Kesukarelawanan dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Aceh

Aceh, Indonesia
2011

Judul:	Kesukarelawanan dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Aceh
Peneliti:	Marwan Idris (UN Volunteer ditempatkan di UN Women, Banda Aceh, oleh Partners for Prevention)
Penasehat:	Farid Muttaqin (UN Women, Aceh), Raymond Brandes (Partners for Prevention, Bangkok)
Foto Depan:	Marwan Idris

Pandangan atau opini yang disampaikan dalam laporan ini bukan senantiasa merupakan cerminan dari opini UNV, UN Women, Partners for Prevention, ataupun organisasi-organisasi lain yang mendukung proyek ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN 4
1. Pendahuluan 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Metodologi Penelitian 6
1.2.1. Tinjauan pustaka 6
1.2.2. Observasi lapangan 7
1.2.3. Wawancara mendalam dengan narasumber utama 7
1.2.4. Analisis dan pengumpulan data 7
2. Kesukarelawanan di Aceh: Sejarah dan Perkembangannya 7
2.1. Asal Muasal Kesukarelawan di Aceh 7
2.2. Perkembangan Pasca-Konflik 8
2.3. Periode Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca-Tsunami 10
2.4. Kesukarelawanan dan Budaya Baru 11
3. Kesukarelawanan dalam Upaya Penghapusan GBV melalui NGO 13
3.1. Peran Kesukarelawanan dalam Berbagai Organisasi yang Bekerja pada Issue GBV 13
3.1.1. Relawan Perempuan untuk Kemanusian (RPuK, Women Volunteers for Humanity) 13
3.1.2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI, Indonesian Women's Coalition) Region of Aceh 14
3.1.3. Flower Aceh 16
3.1.4. Balai Inong Gampong Alue Deah Teungoh 18
3.1.5. Solidaritas Perempuan Wilayah Aceh 19
3.1.6. Balai Syura 21
3.2. Kesukarelawanan serta Strategi Lain yang Digunakan oleh NGO Perempuan 22
3.2.1. Fundraising 22
3.2.2. Sumber Daya 24
3.3. Kendala yang Dihadapi dalam Bekerja pada Isu-Isu GBV 24
3.4. Periode Pascadonor: Mencari Solusi 25
3.5. Kesukarelawanan dan Keterlibatan Laki-Laki: Studi Kasus pada Pulih Foundation 26
3.5.1. Seminar mengenai "Pelibatan Laki-Laki dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh" 27
3.5.2. Lomba Pidato bagi Pelajar SLTA 28
3.5.3. Forum Belajar Bersama dan Aksi Damai 28
3.5.4. Melibatkan Laki-Laki demi Perubahan yang Berkelanjutan 29
4. Kesimpulan dan Rekomendasi 30
4.1. Kesimpulan 30
4.2. Rekomendasi 30
BIBLIOGRAFI 33

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan
ALLB	Aliansi Laki-Laki Baru
AMM	Aceh Monitoring Mission
CBO	Community-Based Organization
DM	Darurat Militer
DOM	Daerah Operasi Militer
DPIA	Duek Pakat Inong Aceh
DnP	Development and Peace
FGD	Focus Group Discussion
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GBV	Gender-Based Violence (Kekerasan Berbasis Gender)
IDP	Internally Displaced Person (Pengungsi)
KPI	Koalisi Perempuan Indonesia
LLB	Laki-Laki Baru
MAA	Majelis Adat Aceh
NGO	Non Governmental Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)
P4P	Partners for Prevention
RI	Republik Indonesia
RPuK	Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
SP	Solidaritas Perempuan
USAID	United States Agency for International Development
UNV	United Nations Volunteers
UN WOMEN	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
VAW	Violence Against Women (Kekerasan Terhadap Perempuan)
VIO	Volunteer Involving Organisation
WCC	Women's Crisis Center

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tiga puluh tahun konflik bersenjata di susul dengan dampak tsunami yang maha dahsyat telah berperan dalam membentuk perubahan sosial daerah Aceh, keadaan geografis serta masyarakatnya. Aceh membenah kembali setelah mengalami krisis-krisis tersebut dengan semangat partisipasi dan suatu tekad untuk membangun kembali komunitas yang lebih kuat dan lebih baik setelah konflik dan tsunami. Masyarakat Aceh memiliki sejarah kesukarelawanan yang mendalam, yang didasari oleh budaya *meuseuraya* atau gotong royong, dan mengacu pada kerjasama yang bersifat sukarela, khususnya terkait dengan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dapat dikatakan bahwa *meuseuraya* adalah suatu contoh bentuk kesukarelawanan, dalam arti bahwa budaya tersebut mendorong warga dalam masyarakat untuk bekerjasama dan saling membantu. Tradisi ini telah membentuk basis pembangunan-kembali di Aceh, meskipun terbukti bahwa konflik dan bencana alam memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kesediaan masyarakat untuk menjadi sukarelawan, serta dampak yang beragam terhadap kapasitas organisasi-organisasi non-profit dalam menangani masalah-masalah seputar kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*, GBV) dan mempromosikan keadilan gender. Semangat membangun kembali dan memodernisasi budaya Aceh, termasuk norma-norma seputar kesetaraan gender, menunjukkan potensi yang sangat besar; namun melihat rumitnya faktor-faktor sosial dan ekonomi yang ikut berperan, maka sangatlah penting untuk mencari cara memperkuat nilai-nilai kesukarelawanan, hingga dapat menciptakan fondasi bagi perubahan sosial yang berkelanjutan.

Konflik bersenjata yang berkepanjangan selama 30 tahun yang melibatkan Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah memecah-belah komunitas; masyarakat Aceh terbagi berdasarkan kelompok pendukung antara kubu pemerintah dan pihak GAM. Konflik berkelanjutan tersebut memiliki dampak yang variatif terhadap masyarakat dan kesediaan mereka dalam berpartisipasi dalam proyek-proyek perubahan sosial. Pengalaman konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam tatanan sosial tradisional yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama. Pengalaman konflik telah membuat warga menjadi lebih protektif terhadap diri sendiri, hingga akhirnya membentuk masyarakat yang lebih individualistik. Namun pada saat yang bersamaan, pergeseran dalam norma-norma sosial, ditambah dengan mobilitas sosial yang lebih tinggi antar kelompok etnis dan sosial, serta pengaruh dari kehadiran lembaga asing, telah melahirkan lingkungan yang matang bagi kegiatan aktivis sosial, khususnya seputar isu hak-hak perempuan dan kekerasan berbasis gender.

Tsunami yang menimpa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 juga merupakan suatu bencana yang ikut berpengaruh besar terhadap sendi-sendi sosial masyarakat, salah satunya kesukarelawanan. Bencana tersebut telah merenggut kurang lebih 200.000 nyawa di samping menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur di sepanjang daratan timur dan barat Aceh. Tsunami tersebut mengilhami para pihak yang bertentangan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan mereka – yang ditandai dengan kesepakatan perdamaian MoU Helsinki. Setelah tsunami, kesempatan bagi pembangunan baru mulai terbuka, dan masyarakat Aceh pun mulai membangun suatu masyarakat yang lebih baik, berdasarkan pada prinsip-prinsip *meuseuraya*. Proses-proses rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan kesempatan baru bagi masyarakat untuk ikut terlibat sebagai sukarelawan dalam proyek-proyek kerjasama. Sangatlah jelas bahwa tanpa kesediaan dan partisipasi masyarakat

untuk membantu para korban tsunami, maka proses rekonstruksi dan rehabilitasi pun tidak akan pernah berhasil secara efektif.

Setelah periode konflik dan tsunami, masuknya lembaga donor asing yang ikut terlibat dalam membangun Aceh kembali lebih baik, telah membawa dampak-dampak pergeseran sosial yang lebih luas, salah satunya mengundang kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan gender. Banyak program rekonstruksi dan lembaga pembangunan yang terlibat dalam upaya-upaya rekonstruksi, yang bekerja menggunakan landasan prinsip-prinsip yang adil-gender, dan mendorong pemahaman terhadap keadilan gender yang lebih luas. Selain itu, melalui upaya-upaya langsung dengan berbagai organisasi perempuan, lembaga-lembaga pembangunan telah menginspirasi banyak aktivis yang bergerak dalam isu hak-hak perempuan untuk bekerja demi memperkuat organisasi-organisasi perempuan yang sudah berkembang, serta untuk menciptakan organisasi-organisasi perempuan baru. Selama periode rekonstruksi, jumlah organisasi perempuan telah meningkat secara signifikan. Program-program berbasis-gender berpotensi besaruntuk memfasilitasi keterlibatan dan kerjasama yang bersifat sukarela yang lebih besar lagi antara masyarakat – terutama perempuan yang menerima dukungan NGO dan lembaga donor untuk bekerja dalam program-program rehabilitasi pasca-tsunami.

Lima tahun setelah tsunami, banyak lembaga donor yang akhirnya “menyelesaikan” misi mereka di Aceh, yang berakibat pada menurunnya dana yang tersedia untuk mendukung program-program yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan gender dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Meskipun demikian, beberapa organisasi-organisasi perempuan terlihat tetap aktif, dan semangat kesukarelawanan masih berlanjut demi program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*, VAW), dan pencegahan GBV.

Maka dari itu, sangatlah penting untuk mendokumentasi kesukarelawanan dan saling kerjasama di Aceh, terutama berhubungan dengan program yang fokus terhadap GBV dan VAW. Dokumentasi ini berusaha memberi pemahaman mengenai inspirasi, modalitas, kegiatan, tantangan, strategi serta pembelajaran yang didapatkan oleh organisasi-organisasi yang menganut sistim kesukarelawanan di Aceh. Diharapkan bahwa dokumentasi ini dapat membantu mengembangkan ide-ide baru bagaimana memperkuat pemikiran-pemikiran tradisional seputar kegiatan kerjasama, agar dapat mendorong semangat sukarela dalam isu-isu GBV dan VAW.

1.2. Metodologi Penelitian

Untuk keperluan dokumentasi kegiatan sukarela dan saling kerjasama di Aceh, terutama terkait dengan GBV dan VAW, maka dilakukan tinjauan pustaka dan situs internet, observasi kontekstual, serta wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama.

1.2.1. Tinjauan pustaka

Sebagai bagian dari dokumentasi ini, maka dilaksanakan tinjauan atas berbagai dokumen yang relevan, dan dilengkapi oleh pencarian materi berbasis-web mengenai sejarah gotong royong dan kesukarelawanan di Aceh. Dokumen-dokumen yang ditinjau diantaranya adalah laporan-laporan resmi lembaga donor, laporan-laporan UN, dokumen-dokumen pemerintah, laporan-laporan survei, brosur-brosur organisasi, laporan, publikasi, halaman internet dan profil-profil organisasi.

1.2.2. Observasi lapangan

Observasi lapangan menjadi bagian penting dari rancangan metodologi, untuk mengamati dinamika sosial dan budaya yang membentuk hubungan antara masyarakat, *Non-Government Organizations* dan lembaga-lembaga pemerintah setempat, khususnya yang berada di Banda Aceh dan Aceh pada umumnya. Di samping hal tersebut, kunjungan lapangan di luar ibu kota juga dilaksanakan untuk melihat berbagai program NGO di Aceh yang terkait dengan GBV.

1.2.3. Wawancara mendalam dengan narasumber utama

Beberapa narasumber utama menyediakan informasi rinci yang digunakan untuk menganalisis isu-isu yang cenderung dihadapi oleh para aktivis perempuan di Aceh. Wawancara mendalam tersebut dilakukan dengan staff NGO serta sukarelawan non-formal yang bekerja pada program-program GBV. Terkait dengan kesukarelawanan, wawancara dilakukan dengan melibatkan ketua Majelis Adat Aceh dan pengamat sosial. Pelaksanaan wawancara diharapkan dapat memberi eksplorasi mendalam mengenai pekerjaan sukarela yang dilakukan untuk mendukung program-program GBV.

1.2.4. Analisis dan pengumpulan data

Objek penelitian ini adalah NGO, baik lokal maupun Internasional, *Volunteer Involving Organisations* (VIO) serta *Community-Based Organizations* (CBO/Organisasi Berbasis Masyarakat) yang paling relevan dan bekerja di bidang pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap GBV di Aceh. Para peserta studi dari tiap organisasi diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peserta juga memberi umpan balik yang menyediakan masukan bagi arah pekerjaan di bidang GBV selanjutnya di Aceh.

2. Kesukarelawanan di Aceh: Sejarah dan Perkembangannya

2.1. Asal Muasal Kesukarelawan di Aceh

Aceh memiliki beragam adat dan norma budaya – suatu cerminan dari penduduknya yang multikultural. Meskipun multi etnis dalam hal mengekspresikan diri mereka melalui berbagai media seni, hukum, dan kebiasaan, masyarakat Aceh tetap saling menghargai. Ketua Majelis Adat Aceh, Badruzzaman Ismail, menjelaskan bahwa kata *adat* diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti "sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang, berlaku terus menerus dari zaman ke zaman."[1] Sangat penting untuk menyadari bahwa prinsip dasar ini menjadi penopang kehidupan di Aceh, bahkan saat daerah tersebut bergerak menuju kebiasaan budaya yang lebih kontemporer. Dalam konteks budaya saat ini, yang menghargai keberlangsungan, maka sangatlah penting bahwa upaya-upaya mempromosikan keadilan gender dan suatu budaya kesukarelawanan yang lebih luas dilaksanakan berdasarkan konsep-konsep serta nilai-nilai tradisional.

Adat Aceh muncul dan berkembang melalui periode sejarah yang panjang – sejak bangkitnya Kerajaan Aceh Darussalam, di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayatsyah (1496-1528) hingga masa kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1903. Salah satu filosofi yang dikenal di Aceh adalah *"Hukum ngon adat, lagee zat ngon sifeut,"* – bahwa budaya-budaya Aceh harus selalu

[1] Wawancara dengan Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh, 5 Juli 2011.

selaras dengan dan tidak berkontradiksi terhadap hukum Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, kesukarelawanan memiliki sejarah yang panjang di Aceh, yang berakar dari kebiasaan budaya *gotong royong*. Di antara masyarakat Aceh sendiri, gotong royong dikenal sebagai semangat kesukarelawanan dan terbangun atas filsafat hidup yang diambil dari *Hadist Maja*[2] *"Udeep sare matee syahid"* (hidup damai dan mati demi kebenaran). Filosofi ini merupakan wujud dari nilai-nilai setempat mengenai keadilan dan kebenaran. Ideologi ini kemudian dilengkapi oleh konsep yang di kenal dengan *"meuseuraya"* atau *"rambate rata"*, yang berarti bahwa semua kelas sosial dianggap sama dalam keterlibatan mereka di berbagai aktivitas sosial atau gotong royong. Filosofi ini merupakan suatu konsep yang dikenal di Aceh dan secara terus menerus, dan tumbuh dari prinsip-prinsip pengabdian kepada agama.[3]

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, masyarakat Aceh dikenal sebagai "masyarakat pemurah" berhubungan dengan praktek gotong royong, hal ini dapat dilihat dari peran penting masyarakat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menjelang masa-masa awal kemerdekaan, masyarakat Aceh menyumbang emas untuk membantu Negara Republik Indonesia untuk membeli pesawat pertamanya, agar para pemimpin Indonesia dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahap Internasional. Budaya kesukarelawanan lainnya dapat dilihat juga dalam kegiatan kepentingan publik, misalnya: pembangunan Mesjid dan *Meunasah* (pusat pendidikan budaya yang dibangun di setiap Gampong); selain itu, dapat dilihat juga melalui semangat memberi, yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti *kenduri* (suatu kegiatan dimana masyarakat setempat menyumbang makanan dan berbagai barang untuk merayakan acara-acara khusus, seperti kelahiran seorang anak atau suatu pernikahan); juga melalui kebiasaan-kebiasaan tradisional yakni mewakafkan tanah untuk generasi yang akan datang, atau untuk keperluan keagamaan, contohnya, wakaf tanah dari *Habib Bugak* di *Mekkah* yang di wakafkan untuk kepentingan masyarakat Aceh di *Mekkah*.[4]

2.2. Perkembangan Pasca-Konflik

Lebih dari tiga puluh tahun konflik bersenjata antara pemerintah RI dengan GAM terjadi di Aceh sehingga memunculkan banyak tantangan yang harus dihadapi Aceh dalam membangun kembali suatu budaya kerjasama dan kesukarelawanan. Masyarakat telah menunjukkan tekad yang sangat besar untuk membangun kembali keadaan sosial mereka, namun dampak dari peperangan, yang telah mendukung tumbuhnya budaya individualis, membutuhkan waktu dan kerja keras untuk merubah kembali menjadi normal.

Heterogenitas Aceh, bersama dengan masuknya gaya hidup modern, membuatnya semakin sulit untuk mendirikan nilai-nilai kesukarelawanan dan keadilan gender dalam beberapa pemahaman budaya tertentu. Wilayah Aceh dihuni oleh beberapa suku: Aceh, Gayo, Melayu Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Aneuk Jamee, dan lain-lain. Sepanjang sejarah Aceh, suku-suku tersebut hidup dengan rukun dibawah hukum Kerajaan Aceh maupun pasca kemerdekaan, hal ini berkontribusi pada multikulturalisme Aceh. Namun proses modernisasi telah berdampak pada segala aspek

[2] **Hadih Maja** atau **Nariet Maja** ialah suatu perkataan atau pribahasa didalam kehidupan masyarakat Aceh. Hadih Maja ini mengandung unsur filosofis, yang digunakan sebagai nasehat/peringatan/penjelasan atau sindiran halus agar menjadi pedoman didalam menjalani kehidupan.

[3] Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, 5 Juli 2011.

[4] Wawancara dengan Hasan Basri M. Nur, 19 Juli 2011.

kehidupan setempat, budaya dan pola pikir, dengan munculnya perilaku-perilaku baru yang kadang dapat menggantikan praktek-praktek tradisional. Menurut Badruzzaman, sistem nilai budaya dalam suatu masyarakat memiliki dua aspek penting: norma (*norms*) dan nilai (*values*). Dimana berlakunya norma bergantung pada aspek waktu, ruang, tempat, dan kelompok sosial di mana sistem budaya tersebut dipraktekkan; sedangkan nilai skala berlaku secara lebih universal. Dalam perkembangan masyarakat, yang kini menjadi lebih modern, nilai-nilai sosial dan budaya yang bersifat universal juga dapat mengisi segala prinsip kehidupan sosial di Aceh.[5] Dalam konteks ini, terdapat berbagai hal yang berpengaruh dalam tatanan masyarakat maju dan modern, sehingga muncul usaha untuk berkompetisi dan akan memengaruhi masa depan Aceh yang lebih baik. Setelah masa konflik dan tsunami, mulai terlihat keinginan kuat untuk menata kembali budaya Aceh, yang banyak mengalami kemunduran karena dampak konflik dan berbagai kekerasan yang berkepanjangan. Semenjak pasca tsunami Aceh menjadi pusat perhatian belahan Dunia yang ikut membawa berbagai bantuan dalam membangun Aceh. Masa rekontruksi memang menyisakan efek positif dan tidak terlupakan juga efek negatif, salah satunya lahirlah gelombang pergerakan yang berupaya membangun kembali nilai-nilai budaya dan praktek-praktek tradisional. Para penulis dan musisi salah satunya ikut menyumbangkan perubahan dengan memunculkan ide baru untuk mulai melihat kembali sejarah dan budaya Aceh. Beberapa contoh termasuk Taufik Al Mubarak, seorang jurnalis muda yang bekerja untuk koran *Harian Aceh* yang menulis Buku berjudul "Aceh Pungo"; Dr. Mohm. Harum, M.Pd. yang menulis *'Memahami orang Aceh'*; serta para musisi seperti Rafli dan Kande, yang mengadopsi gaya musik khas etnis Aceh juga menjadi lambang penting dalam mempromosikan nilai-nilai dan budaya tradisional.

Menurut tokoh gerakan perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzzaman (juga pendiri, ketua, dan Direktur Eksekutif Flower Aceh), para Ulama Salafi memainkan peran penting dalam proses perubahan budaya baru di Aceh. Kamaruzzaman percaya bahwa peran penting yang kini dimainkan oleh para Ulama ada hubungannya dengan ketidakstabilan yang dialami selama lebih dari 30 tahun silam. Di bawah kondisi seperti itu, di mana fungsi dari institusi adat mengalami kelemahan, para Ulama memainkan peran kunci dalam membentuk budaya di Aceh, salah satunya melalui *fatwa* dan *ijtihad* (bimbingan agama seputar perkara yang tidak dibahas secara langsung dalam Quran atau hadith – seperti bagaimana seharusnya mengajar anak laki-laki dan perempuan, peran dan layanan yang seharusnya diberikan seorang istri kepada suaminya, dsb.)[6]

Menurut pengamat sosial-budaya, Hasan Basri, para pemimpin non-formal, termasuk kelompok muda yang memiliki mobilitas tinggi, juga telah berkontribusi dalam mempengaruhi perubahan budaya dan membawa pandangan-pandangan baru di Aceh. Kelompok-kelompok muda telah menunjukkan semangat yang sangat tinggi dalam mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar lagi dalam politik, serta mendorong masuknya prinsip-prinsip keadilan gender dalam pembuatan kebijakan umum. Meskipun keterlibatan perempuan bukanlah suatu aspirasi yang baru dalam masyarakat Aceh – perempuan telah terlibat dalam sektor publik dan politik sejak zaman Kerajaan Aceh – generasi muda telah terus melanjutkan perjuangan tersebut.[7] Keberadaan kelompok muda juga meningkatkan kebutuhan atas teknologi informasi dan internet, yang juga membawa paradigma budaya serta perspektif-perspektif baru.

[5] Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, 5 Juli 2011.

[6] Wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, 27 Juli 2011.

[7] Wawancara dengan Hasan Basri M. Nur, 19 Juli 2011.

Penulis dan Editor untuk kantor berita *Aceh Feature*, Linda Christanty, yang mendokumentasi keadaan pasca-konflik dan pasca-tsunami di Aceh, juga telah memerhatikan peran khusus yang dimainkan para pelajar dalam membangun-kembali daerahnya. Setelah tsunami, meningkatnya jumlah beasiswa memberi kesempatan bagi lebih banyak pelajar dari Aceh untuk mencari ilmu di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia. Hal tersebut memungkinkan tercetaknya budaya baru dan pergeseran ideologi dalam generasi muda kearah yang lebih positif. Proses perubahan dalam generasi ini juga semakin dipermudah dengan adanya tokoh-tokoh media, yang memainkan peran penting dengan menyuarakan bentuk-bentuk budaya baru serta menyebarluaskan berita mengenai perkembangan dan situasi terkini kepada masyarakat. Christanty juga melihat peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok politik dalam proses transformasi budaya. Para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) misalnya, melalui Partai Aceh (PA), berhasil menduduki hampir seluruh parlemen di kabupaten/kota di Aceh, yang sebagian besar terdiri dari mantan anggota GAM. PA juga mendominasi parlemen di DPRK dengan 33 kursi dari 69 kursi; hal ini mempermudah mereka memproduksi *qanun* dan kebijakan mengenai perubahan-perubahan budaya baru di Aceh.

2.3. Periode Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca-Tsunami

Proses rekontruksi pasca-tsunami telah menjadi suatu pemicu tumbuhnya sikap baru dalam bekerjasama untuk membangun Aceh kembali menjadi lebih baik. Hal ini, ditambah dengan masuknya keterlibatan bantuan asing dari berbagai belahan dunia, salah satunya terkait dengan pengintegrasian prinsip-prinsip keadilan gender dalam proses rahab dan rekontruksi. Namun dampaknya sangatlah beragam, sebab organisasi-organisasi lembaga donor mengalami kesulitan untuk mempertahankan momentum ini dalam menciptakan solusi-solusi yang berkelanjutan.

Gempa yang berkekuatan hingga 9.3 skala Richter terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, tepat sebelum jam 08:00 WIB. Lokasi episentrum terletak di barat Laut Sumatera, sebelah utara Pulau Simeulue (kurang lebih 160 km barat Sumatera). Gempa tersebut berpusat 30 km di bawah tingkat air laut. Tsunami yang menyusul telah mengakibatkan kematian hingga 283.100 nyawa; selain itu, 140.000 korban dinyatakan hilang, dan 1.126.900 kehilangan rumah mereka. Puluhan bangunan hancur, khususnya di Meulaboh, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan mengalami kerusakan akibat tsunami tersebut.[8]

Masuknya bantuan kemanusiaan pasca-tsunami berperan sebagai salah satu aktor perubahan budaya di daerah di Aceh, yang berakibat pada dampak-dampak positif dan negatif. Beberapa diantara lembaga donor dikritik karena gagal memerhatikan pemahaman dan budaya setempat dalam penyaluran bantuan mereka – khususnya berhubungan dengan melibatkan budaya gotong royong dan kerjasama. Mekanisme bantuan asing yang telah mengabaikan kekuatan-kekuatan sosial-budaya lokal ini tidak hanya menyebabkan mereka mengalami kesulitan, namun juga berkontribusi pada berkurangnya tradisi gotong royong di Aceh. Gelombang masuknya bantuan juga memberi rasa ketergantungan dalam masyarakat Aceh, yang pada akhirnya melihat bantuan donor sebagai satu-satunya jalan menuju pemulihan dari tsunami dan konflik. Sebagai dampaknya, masyarakat Aceh juga menjadi lebih konsumtif dan kurang produktif.[9] Pengamat sosial dan penulis Hasan Basri, menyatakan bahwa kebiasaan perilaku budaya masyarakat Aceh kontemporer yang

[8] Berdasarkan United State Geological Survey.

[9] Wawancara dengan Linda Chistanty, 22 Juni 2011, pengamat sosial, menetap di Banda Aceh untuk kantor berita Aceh Feature, dan penulis aktif.

lebih menunjukkan pola pikir dan perilaku 'instan' di bawah pengaruh 'banjirnya' bantuan dan donasi lembaga-lembaga donor pada masa pascatsunami masih ada harapan untuk 'dikembalikan' pada nilai-nilai budaya yang lebih 'positif' dan 'produktif' seperti masa-masa sebelum tsunami, melalui: perbaikan ekonomi dan kesempatan kerja; jaminan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat; serta upaya untuk menghidupkan-kembali nilai-nilai budaya yang positif berdasarkan asas kebersamaan yang kental dalam masyarakat Aceh.[10]

Budaya ketergantungan-pada-bantuan ini juga merambah dan berkembang di daerah-daerah pasca-konflik di Aceh, walau tidak terkena dampak secara langsung dari tsunami, daerah pasca konflik juga menerima bantuan lembaga donor yang diberikan sebagai salah satu upaya rekonstruksi. Berbagai mekanisme dan model bantuan yang dipilih oleh lembaga-lembaga donor, juga berkontribusi terhadap budaya ketergantungan tersebut. Salah satunya adalah; Pembayaran per diem dan uang saku perjalanan untuk menghadiri berbagai pertemuan mulai mengikis nilai-nilai tradisional dari kerjasama dan kesukarelawanan. Sebelumnya, masyarakat akan dengan sukarela berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan umum yang diselenggarakan di daerahnya. Namun sebagai dampak dari implementasi bantuan asing, masyarakat mulai melihat bahwa mereka dapat menerima uang saku dengan menghadiri rapat. Dalam beberapa kasus, dengan menghadiri rapat saja dapat melebihi pendapatan dari jumlah yang mereka peroleh dari pekerjaan sehari-hari.[11]

2.4. Kesukarelawanan dan Budaya Baru

Menjelang lima tahun program-program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tsunami – yang berakhir pada tahun 2009 – Aceh mengalami perubahan fisik dan budaya. Infrastruktur umum telah mengalami peningkatan, dan masyarakat di daerah tersebut terkesan lebih terbuka dan siap untuk perubahan. Program-program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tsunami telah menyediakan kesempatan bagi sebagian masyarakat Aceh untuk mengembangkan kapasitas SDM mereka. Banyak lembaga tidak hanya memberi bantuan teknis dan finansial dalam rekontruksi, melainkan juga dengan kegiatan-kegiatan *capacity building* langsung yang ditujukan untuk membangun keterampilan dan pengalaman masayarakat Aceh untuk keberlangsungan hidup paska pemulihan. Kehadiran lembaga-lembaga donor juga telah membuka pintu agar masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan NGO serta berkerja langsung dengan lembaga donor merupakan suatu bagian penting dalam proses pengembangan kapasitas masyarakat Aceh, yang memberi mereka kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman dan menjadi agen-agen perubahan sosial dalam membangun Aceh kembali lebih baik setelah tsunami.[12]

Yang menarik, perilaku dan gaya hidup baru sehari-hari banyak diadopsi oleh masyarakat Aceh, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses rekontruksi, yang sedikit-banyak bisa menjadi refleksi bagi dinamika yang telah dan sedang terjadi terkait 'kehadiran' budaya baru. Salah satunya terlihat dari gaya hidup generasi muda yang semakin familir dengan teknologi, lebih mudah mengakses informasi serta memiliki mobilitas lebih tinggi. Hal ini juga terlihat dengan adanya peningkatan dalam ketersediaan layanan internet, yang memunculkan perilaku-perilaku baru, khususnya antara generasi muda Aceh. Proses ini telah terbantu dengan meningkatnya jumlah

[10] Wawancara dengan Hasan Basri M. Nur, pengamat sosial menetap di Banda Aceh dan aktif sebagai penulis di media cetak, 19 Juli 2011.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

warung kopi yang menyediakan jasa Wi-Fi gratis bagi pelanggannya, serta dengan peningkatan ekonomi melalui bisnis-bisnis kelompok yang difasilitasi oleh NGO, yang menjadi bagian penting dari dinamika perubahan tersebut. Sebagai hasilnya, kegiatan-kegiatan sosial mulai mengadopsi prinsip-prinsip yang biasanya diaplikasi oleh NGO – seperti prinsip-prinsip pertanggungjawaban, transparansi, profesionalisme, serta pengintegrasian terhadap isu-isu sosial dan gender.

Observasi lapangan yang dilakukan penyusun juga akhirnya menunjukkan bahwa tsunami telah menggiring masyarakat menuju pergeseran dalam kebiasaan-kebiasaan hidup, yakni masyarakat mulai hidup dalam lingkungan budaya yang lebih variatif. Setelah tsunami terjadi, hidup berkelompok menjadi suatu fenomena yang lebih umum ditemukan. Pembangunan kompleks perumahan baru, sebagai bagian dari program relokasi, ikut menyumbang terhadap pembentukan sistem-sistem kehidupan baru: beberapa masyarakat sebelumnya hidup dalam kelompok homogen di daerah asalnya, dan proses relokasi memaksa beberapa diantaranya untuk kini hidup bersama masyarakat lain yang berasal dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang agama. Perubahan-perubahan ini selanjutnya juga berkontribusi terhadap pergeseran dalam pola pikir dan gaya hidup secara lebih luas. Pembangunan kompleks perumahan tersebut sebenarnya mengakibatkan peningkatan dalam perilaku individualis, yang menekankan pada segala sesuatu yang 'serba instan', dan yang merusak nilai-nilai tradisional seperti konsep kebersamaan dan kesabaran.

Sikap ingin segala sesuatu tercapai secara instan mulai tampak dalam komunitas pada daerah-daerah relokasi. Terdapat perubahan dalam gaya hidup masyarakat menuju pola hidup yang lebih modern; dimana permintaan atas barang dan jasa lebih tinggi – misalnya permintaan atas mobil dan peralatan rumah tangga; dimana segala sesuatu didapatkan secara instan – yang paling nyata dapat dilihat dari penggunaan jasa *catering* yang menggantikan kebiasaan-kebiasaan tradisional seperti *kenduri*, pesta dan acara-acara adat lainnya; serta mobilitas di luar rumah menjadi cukup tinggi. Semua perubahan ini terjadi karena pergeseran menuju lingkungan hidup yang lebih heterogen, sehingga budaya-budaya baru ini mulai menyatu – padahal dulunya kebiasaan-kebiasaan tersebut biasanya hanya dipraktekkan oleh kalangan elit.[13] Hal ini terjadi di beberapa komunitas yang heterogen, terutama pada masyarakat yang merupakan korban tsunami, dan juga memberi dampak positif dalam mendukung kehidupan yang lebih baik dari segi kesejahteraan ekonomi, dan membangun motivasi untuk tetap berjuang demi kehidupan yang lebih bagus. Menurut Linda Christanty, dalam kondisi-kondisi seperti ini, masyarakat Aceh harus memiliki orientasi menuju masa depan, menempatkan sejarah sebagai fondasi perubahan, serta Aceh perlu keluar dari cara pandang budaya yang ekslusif dan tertutup.[14]

Akan tetapi, keadaan hidup berkelompok dalam daerah-daerah relokasi, juga memiliki potensi besar untuk menciptakan prinsip-prinsip kerjasama dan kesukarelawanan, agar dapat menghidupkan kembali filosofi gotong royong. Masyarakat Aceh telah lama memberlakukan prinsip-prinsip kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, sehingga kebiasaan saling menolong dan gotong royong yang dulu kerap dipraktekkan akan mudah dihidupkan kembali dalam lingkungan baru.

[13] Menurut C. Wright Mills dalam *The Sociological Imagination 1959.*

[14] Wawancara dengan Linda Chistanty, pengamat sosial, menetap di Banda Aceh untuk kantor berita Aceh feature dan juga penulis aktif.

3. Kesukarelawanan dalam Upaya Penghapusan GBV melalui NGO

3.1. Peran Kesukarelawanan dalam Berbagai Organisasi yang Bekerja pada Issue GBV

Periode masa setelah tsunami telah ditandai oleh masuknya berbagai NGO serta banyaknya bermunculan organisasi-organisasi sosial masyarakat baru yang berkomitmen dalam proses pemulihan dan pembangunan-kembali Aceh menjadi lebih baik. Istilah 'NGO' menjadi salah satu yang paling umum digunakan di antara masyarakat setelah tsunami – suatu pertanda peran dominan yang dimainkan oleh NGO dalam proses transformasi. Sebelum proses ini berlangsung, sudah terdapat sejumlah NGO yang bekerja dalam isu keadilan-gender, namun setelah konflik dan tsunami juga terjadi peningkatan dalam jumlah organisasi yang berkomitmen berkerja untuk isu penegakan keadilan gender serta mempromosikan hak-hak perempuan. Kehadiran NGO, termasuk NGO yang berjuang demi isu-isu keadilan gender dan perempuan, menjadi suatu hal yang penting bagi pekerjaan kemanusiaan yang merupakan fokus utama dari pekerjaan NGO. Kehadirannya pun sangat krusial demi menumbuhkan nilai-nilai kesukarelawanan – hal ini khususnya berlaku untuk NGO yang bergerak untuk isu keadilan gender dan perempuan, yang berusaha membuat masyarakat terlibat secara lebih aktif sebagai sukarelawan dalam perjuangan mencegah dan menghapus VAW serta memberlakukan hukum-hukum keadilan gender di Aceh.

Berikut adalah profil beberapa NGO yang bekerja di Aceh, yang berperan secara signifikan dalam menumbuhkan semangat kesukarelawanan dan memiliki fokus pada kesukarelawanan dalam kegiatan penegakan hak-hak perempuan, VAW dan keadilan gender. Sebagai catatan, profil NGO yang dideskripsikan di bawah ini hanya mendokumentasi sebagian saja NGO yang bekerja dalam isu-isu gender dan perempuan, sebagai refleksi mengenai peran penting NGO perempuan dalam menguatkan semangat kerjasama dan kesukarelawanan. PULIH Aceh, suatu organisasi yang fokus pada pelibatan laki-laki demi mencapai keadilan gender, digambarkan secara terpisah dalam bagian 3.5.

3.1.1. Relawan Perempuan untuk Kemanusian (RPuK, Women Volunteers for Humanity)

Informasi lembaga	
Berdiri	2 juni 1999
Visi dan misi	Mewujudkan masyarakat yang peduli gender, serta mendorong terbentuknya pemulihan ekonomi bagi perempuan
Donatur	NOVIB, UN WOMEN, UNICEF, World Bank, dan lain-lain
Jumlah staf	13 orang (9 perempuan dan 4 laki-laki)
Program utama	Pengembangan ekonomi perempuan melalui pengorganisasian kelompok serta mendongkrak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Area kerja	7 kabupaten/kota daerah tsunami dan konflik
Kontak	Telepon/Faksimile: +62651-7551659; Email: tim_rpuk@yahoo.co.id
Alamat	Jl. Rukun Damai Utama No. 9, Kp. Pineung Banda Aceh 23116

Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) didirikan jauh sebelum tsunami terjadi, untuk melaksanakan program-program di Aceh yang berfokus pada isu-isu gender. Didirikan selama periode puncak konflik, upaya-upaya RPuK berfokus menyalurkan bantuan bagi pengungsi (*Internally Displace Person*, IDP). Selama periode evakuasi, beberapa kelompok dan sukarelawan perempuan

ikut terlibat dalam menyalurkan logistik kepada para pengungsi. Melalui proses ini, para sukarelawan menjadi sadar akan kurangnya perhatian yang diberikan pada kebutuhan-kebutuhan khusus para perempuan yang hidup dalam pengungsian. Kebutuhan akan tempat mandi yang aman, kebutuhan terkait reproduksi, dan lain-lain, banyak kebutuhan khusus perempuan yang susah dipenuhi di pengungsian. Untuk mengatasi masalah ini, para sukarelawan perempuan kemudian mencari donor untuk mengatasi kebutuhan anak dan perempuan (seperti pembalut). Usaha RpuK mendapatkan hasil, NOVIB, sebuah lembaga donor yang bermarkas di Belanda, bersedia memberi bantuan untuk beberapa kebutuhan khusus pengungsi perempuan dan anak. Berawal dari pengalaman ini, maka sejumlah sukarelawan perempuan yang bekerjasama dalam tim distribusi tersebut kemudian membentuk suatu organisasi yang kini dikenal sebagai RPuK.

Visi RPuK adalah mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui pemberdayaan wanita.[15] RPuK telah melaksanakan dan mengimplementasi berbagai program bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan anak. Dalam implementasi programnya, RPuK sering memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, dan khususnya kelompok-kelompok perempuan.

Sangatlah jelas bahwa RPuK didirikan oleh sekelompok perempuan yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip kesukarelawanan. Lebih dari itu, proses yang digambarkan di atas juga menunjukkan bagaimana isu-isu perempuan – atau keinginan memenuhi kebutuhan serta hak-hak perempuan dan anak – merupakan suatu sumber inspirasi yang sangat penting agar menjadi terlibat dalam pekerjaan sosial-kemanusiaan, dan juga bagian penting dalam upaya melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kesukarelawanan.

Dengan berkurangnya jumlah donor yang bekerja di Aceh, RPuK mulai menghadapi tekanan-tekanan pendanaan yang semakin meningkat. Untuk mengatasi berkurangnya jumlah donor ini, RPuK telah melakukan beberapa upaya untuk menghemat dana. RPuK mulai bekerja dengan badan-badan kepemerintahan yang relevan (seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BP3A) bentuk kerjasama misalnya pihak pemerintah menyediakan fasilitas ruang *training* dan berbagai jenis bantuan serupa lainnya yang dapat mengurangi pengeluaran program. Penggalangan dana juga dilakukan untuk menutupi biaya yang diperlukan dalam keadaan darurat – seperti bila terjadi tsunami, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Di samping inisiatif-inisiatif tersebut, RPuK juga sudah mulai mendiskusikan kemungkinan pemotongan gaji staf. Meskipun kebijakan ini belum diimplementasikan, diskusi-diskusi tersebut membuktikan bahwa para staf RPuK tidak bekerja di organisasi tersebut demi keuntungan finansial. Fokus mereka tetap berada pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kaum marginal dan rentan.

3.1.2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI, Indonesian Women's Coalition) Region of Aceh

Informasi Lembaga	
Berdiri	19 Januari 2006
Visi dan misi	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.
Donatur	DnP (Development and Peace), UN WOMEN, Oxfam, IOM, AMM, World Bank, dan lain-lain
Jumlah staf	8 orang (7 Perempuan dan 1 Laki-laki)

[15] Wawancara dengan Azriana, Sekjen RPuK, 18 Juli 2011

Jumlah anggota seluruh Aceh	3.842 orang
Program utama	Pengembangan ekonomi melalui dana bergilir (revolving fund). Pemberdayaan dan pendidikan politik kader, Advokasi untuk perubahan kebijakan yang adil gender dan demokratis di bidang politik, ekonomi, dan semua bidang kehidupan. Penguatan organisasi yang kuat dari segi dana, sumber daya manusia (anggota), mekanisme organisasi, perangkat dan jaringan kerja.
Area kerja	Aceh Besar, Aceh Timur, Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara, Pidie, Aceh Jaya dan Abdya
Kontak	Telepon: +62651-635925; Email: kpi_wilayahnad@yahoo.co.id
Alamat	Jl. T.Iskandar, Lr Tgk Pagar Air, No. 17, Gampong Lambhuk Ulee Kareng, B. Aceh 23118
Website	http://www.koalisiperempuan.or.id/

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) didirikan di tingkat Nasional pada tahun 1998 dan saat ini telah beroperasi di beberapa provinsi di Indonesia. KPI Aceh terbentuk pada tanggal 19 Januari 2006 dan diberi mandat untuk secara independen mengelola kegiatan-kegiatan yang dikerjakan di Aceh. KPI bekerja langsung dengan lembaga-lembaga donor dan memfasilitasi penyebaran prinsip-prinsip partisipasi perempuan secara lebih luas, dengan bekerja bersama berbagai program-program pembangunan pada daerah-daerah bekas konflik.

Visi organisasi ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Struktur KPI dalam menggerakan misi dan fungsinya dalam berbagai tingkat sosial adalah melalui perkumpulan ibu-ibu dan perempuan – dari tingkat pronvinsi hingga *gampong*.[16] Implementasi kegiatan KPI didasari pada prinsip-prinsip kerjasama masyarakat, yang dapat dilihat dari struktur cabang dan level, serta penggunaan rumah ketua pengurus, yang disebut sebagai *balai*, untuk pertemuan dan koordinasi. Hampir seluruh fasilitas yang digunakan oleh KPI disediakan secara sukarela oleh para ketua pada tiap level.

KPI Aceh didirikan tidak terlepas dari keinginan untuk membantu para korban tsunami, khususnya mereka yang tinggal di barak atau penampungan pengungsi. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan KPI berpusat pada penyediaan konsumsi dan dapur umum. Melihat situasi pengungsian, para aktivis perempuan dari KPI menyadari kurangnya kesadaran perempuan atas hak-hak mereka sendiri, serta kurang diperhatikannya kebutuhan-kebutuhan perempuan. Para Ibu-Ibu dalam pengungsian juga tidak mengerti hak mereka sendiri sebagai perempuan, ataupun hak reproduktif mereka. Para aktivis KPI pun menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran mengenai hak reproduktif serta isu-isu hak perempuan lainnya. KPI kemudian berkeinginan meningkatkan kesadaran atas hak-hak reproduksi serta mewujudkan masyarakat yang memperlakukan perempuan dan anak-anak secara adil dan berkeadilan gender.[17] Setelah terbentuk di wilayah Provinsi dan daerah-daerah yang terkena dampak tsunami, KPI kemudian menyebar jaringannya ke daerah-daerah bekas konflik untuk melaksanakan berbagi programnya.

KPI Aceh memiliki fokus pada mempromosikan keadilan gender dan hak-hak perempuan dengan mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang responsif-gender dengan bekerjasama dengan *Development and Peace* (DnP). Program-program lain juga termasuk diantaranya pelatihan bagi para kader yang tergabung dalam perkumpulan dan anggota KPI; tiap kader diwajibkan mengikuti pelatihan

[16] Wawancara dengan Evany Clara Yanti, Sekretaris KPI Wilayah Aceh, 25 Juli 2011

[17] Wawancara dengan Evany Clara Yanti, Sekretaris KPI Wilayah Aceh, 25 Juli 2011, juga lihat situs KPI di http://www.koalisiperempuan.or.id/

mengenai hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan partisipasi perempuan. Dengan pelatihan-pelatihan tersebut, diharapkan bahwa para kader memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi seputar hak-hak perempuan pada tingkat masyarakat, melalui forum dan pertemuan masyarakat di *Gampong* (balai desa). Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPI bekerja secara berjejaring; saat ini KPI memiliki 3.842 anggota dari 8 kabupaten/kota di seluruh Aceh, yang membentuk berbagai kelompok masyarakat dan berperan sebagai agen-agen perubahan, agar dapat mewujudkan keadilan bagi perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan beberapa lembaga lain, KPI juga tetap mengedepankan prinsip-prinsip kesukarelawanan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan programnya. Salah satu kebijakan yang di tempuh adalah anggota KPI diwajibkan membayar iuran bulanan. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk pinjaman, atau sebagai dana bergulir, untuk digunakan oleh para anggota bila dibutuhkan. Meskipun dana yang terkumpul tidak begitu banyak, proses ini sangat menggugah rasa saling memiliki dan kerjasama antara para anggota.

Foto: Pementasan TV Eng Eong Sebagai sebagai satu media kampanye tentang partipasi perempuan dalam pembangunan dan politik di era paska konflik.

3.1.3. Flower Aceh

Informasi Lembaga	
Berdiri	23 September 1989
Visi dan misi	Terwujudnya tatanan sosial yang adil dalam relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.
Donatur	USAID, HIVOS, ICO, UN WOMEN, Kedutaan Norwegia dan lain-lain
Jumlah staf	10 orang
Program utama	Advokasi kebijakan dan penyuluhan hukum yang berkeadilan gender serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan
Area kerja	7 kabupaten/kota terdiri dari Aceh Besar, Banda Aceh, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Barat
Kontak	Telepon/ Faksimile: +62651 8056410
Alamat	Jl. T.nyak makam no.3 Lampineung, Banda Aceh, Indonesia
Website	http://floweraceh.or.id

Flower, yang berdiri pada 1989, merupakan organisasi perempuan yang pertama-tama mengusung isu tentang hak-hak perempuan dan keadilan gender di Aceh. Flower dibentuk oleh beberapa aktivis perempuan, berawal dari pengalaman seorang perempuan yang mengalami ketidakadilan, tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus menikah di usia yang masih produktif atau kanak-kanak. Pendirian Flower pada waktu itu juga termotivasi oleh penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang membuka peluang terjadinya begitu banyak kekerasan dan ketidakadilan yang dihadapi kaum perempuan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual dan pemerkosaan, yang pada waktu itu tampak diabaikan oleh pemerintah, hal ini, memberi alasan-alasan baru untuk mendalami isu-isu VAW dan ketidaksetaraan dalam konteks konflik di Aceh.[18]

Saat ini, Flower telah menjadi *Perkumpulan Flower*, yang anggotanya terdiri dari kumpulan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh strata masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama, akademisi, serta aktivis perempuan, dan berjuang demi kesetaraan gender. Dengan menjadi suatu perkumpulan, Flower mampu menjaga dukungan dan sumber daya finansial, sebagai contoh flower memiliki berbagai sumber daya manusia yang selama ini telah terlibat dalam program-program mereka. Dengan sumber daya manusia yang memadai, Flower pun mampu melanjutkan pekerjaan mereka, menyediakan fasilitator bagi berbagai NGO, lembaga pemerintah dan universitas. Fasilitator-fasilitator tersebut menjadi tulang punggung dalam program dan kegiatan Flower. Mereka juga bersedia untuk tidak dibayar penuh bahkan ada beberapa di antaranya yang bersedia untuk tidak mendapatkan bayaran sama sekali.

Program-program Flower berfokus pada: penyediaan penyuluhan dan informasi hukum, meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak reproduktif, dan peningkatan kapasitas dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan. Flower melakukan advokasi bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan negara (korban diskriminasi politik, sosio-ekonomi, budaya, atau hukum), serta advokasi agar terjadi perubahan kebijakan yang memerhatikan hak-hak serta kepentingan perempuan. Flower terus melaksanakan berbagai kegiatan dan program di seluruh Aceh untuk mempromosikan hak-hak perempuan, termasuk pembentukan program simpan-pinjam bagi kelompok usaha perempuan, dan penyuluhan perempuan dan remaja mengenai hak-hak perempuan serta kesehatan reproduktif.[19]

Kesukarelawanan menjadi konsep dasar di setiap kegiatan Flower. Tidak sedikit fasilitator dengan berbagai latarbelakang keahlian bersedia bekerja tanpa dibayar penuh, bahkan ada diantaranya yang bersedia tidak dibayar sama sekali. Flower juga telah mampu mengsubsidi sebagian pengeluarannya dengan membentuk klinik kesehatan yang mengumpulkan dana guna mendukung biaya operasional lembaga. Meskipun disadari keberadaan klinik kesehatan tersebut belum mampu membiayai secara keseluruhan semua pengeluaran lembaga, akan tetapi klinik tersebut juga berkontribusi penting pada masyarakat setempat, dengan memberikan layanan kesehatan yang terjangkau khususnya menyediakan layanan kesehatan reproduktif wanita.[20]

[18] Wawancara dengan Desy Setiawaty, Direktur Pelaksana Flower Aceh, 14 Juli 2011
[19] Ibid.
[20] Wawancara dengan Desy Setiawaty, Direktur Pelaksana Flower Aceh, 14 Juli 2011

Foto: Pelatihan pembuatan tempe, sebagai salah satu bentuk pendampingan kelompok perempuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat korban tsunami

Flower juga melakukan pemberdayaan ekonomi dengan turut mempromosikan hasil kerajinan tangan, membuat tempe bagi kaum perempuan korban konflik. Hal ini merupakan bentuk kontribusi Flower dalam membantu kaum perempuan mencapai kemandirian ekonomi agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik serta didasari oleh keadilan sosial antara laki-laki dan perempuan.[21]

3.1.4. Balai Inong Gampong Alue Deah Teungoh

Informasi Lembaga	
Berdiri	Agustus 2007
Visi dan misi	Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi.
Donatur	WDC, BP3A, Flower, World Vision, UN WOMEN dan lain-lain
Jumlah anggota	40 orang anggota (terdiri dari 3 kelompok)
Program utama	Peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang pendidikan dan penguatan keterampilan *(life skill)* perempuan korban tsunami
Alamat	Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh
Area kerja	Kota Banda Aceh

Balai Inong adalah organisasi perempuan di tingkat komunitas yang bekerja untuk membantu perempuan korban tsunami. Balai Inong tersebar di beberapa desa di beberapa kecamatan di kota Banda Aceh. Dokumentasi ini hanya menggambarkan Balai Inong yang beroperasi di Kecamatan Meuraxa.

Dibentuk pada tahun 2007 oleh sejumlah perempuan korban tsunami, tujuan utama Balai Inong adalah memastikan adanya partisipasi perempuan dalam proses penerimaan bantuan dan pembangunan, agar bantuan disalurkan secara adil dan setara. Terdorong oleh adanya diskriminasi yang nyata dan beberapa temuan di lapangan, beberapa perempuan kemudian merasa terpanggil

[21] Ibid.

dan penting untuk membentuk suatu organisasi berbasis-komunitas untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan ikut mendapatkan perhatian penuh.

Balai Inong lebih mengandalkan sukarelawan untuk menjalankan visi dan misinya. Lain halnya dengan sebagian besar lembaga lain, tidak adak staf Balai Inong yang mendapatkan gaji bulanan. Anggota perempuan Balai Inong bekerja sukarela atas prinsip kebersamaan dan gotong royong. Tidak jarang para anggota bahkan mengeluarkan uang mereka sendiri demi membantu organisasi mencapai tujuannya. Dua unit *shelter*, atau tempat pertemuan, telah disediakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian Balai Inong. Bahkan Rumah ketua juga digunakan sebagai kantor dan tempat kegiatan operasional lainnya bila diperlukan.[22]

Balai Inong di Meuraxa melaksanakan berbagai kegiatan untuk membangun kapasitas ekonomi dan pendidikan perempuan. Banyak perempuan korban tsunami telah kehilangan pekerjaan dan sumber utama mata pencaharian mereka, sedangkan sebagian menjadi janda karena tsunami dan terpaksa mencari pekerjaan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Salah satu kegiatan Balai Inong dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pelatihan bagi perempuan dalam hal: membuat kue, menjahit, membuat saus tiram. Pelaksanaan program-program ini telah didukung oleh beberapa lembaga donor.[23]

Foto: Pelatihan membuat kue sebagai salah satu bentuk kegiatan Balai Inong dalam rangka meningkatkan keberdayaan ekonomi perempuan korban tsunami.

Semangat kesukarelawanan dari Balai Inong ditunjukkan dalam dedikasi para staf yang mengorbankan waktu, uang, dan tenaga demi melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan. Komitmen dan keinginan belajar untuk menciptakan perubahan sangat jelas terlihat hingga kini.

3.1.5. Solidaritas Perempuan Wilayah Aceh

Informasi Lembaga	
Tahun berdiri lembaga	Januari 2004

[22] Wawancara dengan Rasyidah, Ketua Balai Inong Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, 14 Juli 2011.
[23] Ibid.

Visi dan misi	Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, anti kekerasan terhadap perempuan dan menghargai kebebasan beragama.
Donatur	NOVIB, APLD, UNFPA, UN WOMEN, HIVOS, The Johaneter, IRC, AJWS dan lain-lain
Jumlah staf dan anggota	40 anggota tersebar di Aceh terdiri dari (42 perempuan dan 7 laki-laki) dan 8 sebagai staf
Program utama	Mewujudkan keadilan bagi perempuan dalam perdamaian serta perempuan dalam politisasi nilai-nilai agama
Area kerja	Bener Meriah dan Aceh Besar
Kontak	Telepon: 0651 31100; Email: paceh-bj@yahoo.com
Alamat	Jl. Belibis, Lr Adam, No.22, Labui- Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh
Website	http://www.solidaritasperempuan.org/

Solidaritas Perempuan (SP) didirikan pada January 2004, pada saat menjelang pilkada Gubernur dan Aceh masih berada dalam keadaan darurat militer. Solidaritas Perempuan terdapat di beberapa provinsi seluruh Indonesia dengan mengusung ide berjuang demi keadilan gender dan penghapusan VAW. Misi utama SP adalah untuk menguatkan kapasitas perempuan dalam partisipasinya di bidang politik – baik sebagai pemilih maupun dicalonkan sebagai wakil rakyat – serta untuk membantu memastikan bahwa pilkada dilakukan secara demokratis dan adil-gender.[24]

Pengalaman SP di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan di daerah-daerah pasca-konflik telah terabaikan oleh pemerintah. SP kemudian bertekad untuk bekerja dengan kaum perempuan tersebut, sebagai titik fokus dalam perjuangan mempromosikan hak-hak perempuan di Aceh. SP telah bekerja dengan berbagai lembaga donor internasional untuk memperluas kesempatan bagi perempuan di Aceh dalam berpartisipasi di bidang politik – suatu langkah penting dalam perjuangan menuju keadilan gender.[25]

Program utama SP adalah dalam hal advokasi mengenai hak-hak perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban tsunami, dan bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seputar hak-hak mereka sendiri. SP mengadakan pelatihan dan pendidikan komunitas untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan pemberdayaan ekonomi. SP wilayah Aceh memiliki 49 anggota. Salah satu bentuk kesukarelwanan dalam menjalankan program, SP memanfaatkan sumber daya yang dimiliki anggota untuk melaksanakan berbagai program. Bentuk partisipasi dan gotong royong para anggota ini merupakan suatu bagian penting dalam implementasi kegiatan dan program, serta demi mencapai tujuan SP dalam mempromosikan keadilan gender dan hak-hak perempuan di Aceh.[26]

Namun bekerja dalam lingkungan pasca-konflik memiliki berbagai tantangan tersendiri. Salah satunya, terlihat pada proses penerimaan terhadap kehadiran orang luar yang masih tertutup, seperti yang dialami oleh para aktivis SP, masyarakat setempat masih menaruh kecurigaan besar terhadap pendatang dan rendahnya rasa kepercayaan. Namun, berbagai tantangan tersebut justeru membuat SP semakin banyak mendapat pengalaman. Salah satu pembelajaran yang didapatkan adalah proses mengelola konflik dan melalui proses pendekatan kekeluargaan (*sensitive approach*)

[24] Wawancara dengan Ruiada, Koordinator program SP Wilayah Aceh, 21 Juli 2011.
[25] Ibid.
[26] Ibid.

sangat membantu mencairkan ketegangan di masyarakat – hal ini dilakukan oleh pada para anggota staf SP dengan menetap dan tinggal bersama warga selama melaksanakan program mereka.

Selama proses kegiatan berjalan, SP mendapat perhatian dari beberapa aktivis perempuan lainnya, sehingga beberapa di antara mereka menawarakan diri untuk ikut bergabung menjadi relawan dalam melaksanakan program bersama SP. Beberapa aktivis tersebut menjadi dari bagian SP dalam melaksanakan programmnya dengan tanpa di berikan imbalan gaji. Kesempatan ini di sambut baik oleh SP sebagai wujud dan penghargaan dari pihak luar terhadap beberapa program SP selama ini.[27]

Ini tidak hanya membantu SP sebagai suatu organisasi, tetapi juga memberikan kesempatan dan dukungan publik yang lebih luas lagi bagi tujuan organisasi.

3.1.6. Balai Syura

Informasi Lembaga	
Berdiri	22 April 2000
Visi dan misi	Membangun pola relasi yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan dalam membangun Aceh yang lebih Adil gender
Donatur	IRI, UNDEP, The Asia Foundation, USAID UN WOMEN dan lain-lain
Jumlah staf	3 orang staf tetap dan 750 anggota perkumpulan (sukarelawan)
Program utama	Advokasi kebijakan terhadap perempuan dan politik, pemenuhan korban dan isu penerapan syariat islam yang humanis
Area kerja	Provinsi Aceh
Kontak	Telepon: +62-51635109; Email: balai_syura@yahoo.co.id
Alamat	Jl T. Iskandar, Sp Iliek, Lr Poskesdes, Gampong Lamteh, Ule Kareng, Banda Aceh

Balai Syura Ureung Inong *Aceh* (BSUIA) didirikan pada tahun 2000, sebagai respon terhadap mandat pertama Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) atau *Musyawarah Perempuan Aceh*. Pada saat itu, berkembang suara kaum perempuan untuk memiliki kesempatan lebih besar agar terlibat dalam proses-proses perdamaian, pembuatan kebijakan, dan dalam kehidupan ekonomi. *Duek Pakat* pada awalnya terbentuk untuk menanggapi isu-isu seputar kondisi perempuan semasa konflik. Banyak dari perempuan Aceh menjadi korban kekerasan konflik, namun pada saat itu, kelompok-kelompok perempuan kurang mendapatkan perhatian dalam proses-proses penyelesaian konflik.

Balai Syura telah mulai melaksanakan programnya pada saat Aceh masih berada dalam situasi konflik. Sejak saat itu, Balai Syura telah membentuk kelompok-kelompok yang disebut dengan *majelis*, untuk bertindak sebagai wakil perempuan di setiap daerah kabupaten/kota di Aceh. Balai Syura juga menjadi wadah bagi beberapa lembaga atau organisasi perempuan yang mempunyai visi untuk mewujudkan keadilan gender di masyarakat Aceh. Selain itu, Balai Syura juga bekerja sebagai salah satu lembaga penyalur bantuan dari lembaga donor yang berfokus kepada isu perempuan dan melakukan berbagai kegiatan advokasi untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan korban tsunami dilaksanakan secara gender-sensitif. Balai Syura juga ikut mengawasi dan berusaha memastikan bahwa Syariah Islam diimplementasikan secara 'humanis'.[28]

[27] Wawancara dengan Ruiada, 21 Juli 2011.

[28] Wawancara dengan Nursiti, Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inoeng Aceh, 14 Juli 2011.

Dukungan para akademisi, aktivis perempuan dan para tokoh agama merupakan salah satu bentuk kesukarelawanan sehingga membuat Balai Syura mampu terus melakukan dan menjalankan program dan kegiatan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan keadilan.

Foto: Pertemuan reguler Rumah Perempuan Politik Aceh (RPPA), salah satu bentuk pelibatan perempuan dalam politik dan pengambil kebijakan.

3.2. Kesukarelawanan serta Strategi Lain yang Digunakan oleh NGO Perempuan

Keinginan untuk berpartisipasi secara sukarela dalam upaya-upaya menyelesaikan permasalahan sosial, terutama tekait gender dan perempuan telah menjadi kunci utama bagi organisasi perempuan di Aceh. Bencana tsunami serta konflik telah memberi motivasi bagi organisasi perempuan untuk berjuang demi nilai-nilai sosial-kemanusiaan dan mendorong masyarakat untuk mempertahankan kerja sosial-kemanusiaan dan melestarikan semangat kesukarelawanan, yang sudah sejak lama menjadi bagian kehidupan sosial-budaya di wilayah ini. Meskipun lembaga-lembaga tersebut memperoleh bantuan finansial dari lembaga-lembaga donor, hal tersebut tidak mengurangi semangat kesukarelawanan dan gotong royong yang ditunjukkan oleh para aktivis yang terlibat di dalamnya. Pandangan untuk terus mempertahankan sifat non-profit lembaga, sementara dukungan finansial lembaga donor tidak selalu tersedia, membuat para aktivis perempuan di lembaga-lembaga tersebut mencari berbagai cara ‘mempertahankan’ eksistensi lembaga sehingga bisa terus menjalankan program dan kegiatannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, berikut adalah beberapa temuan terkait bentuk kesukarelawan yang ditunjukan oleh beberapa NGO yang berkerja untuk isu gender di Aceh.

3.2.1. Fundraising

Masa rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-tsunami telah membuka pintu bagi banyak lembaga donor dari seluruh dunia untuk mulai beroperasi di Aceh. Dalam pelaksanaan misi mereka, lembaga donor internasional membangun kerjasama dengan NGO lokal, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi perempuan yang mengusung isu keadilan gender dan hak-hak perempuan. Akan tetapi, tidak semua NGO menerima dana yang mencukupi untuk melaksanakan programnya. Sementara, setelah masa akhir periode rekonstruksi dan rehabilitasi, bantuan keuangan tersebut menjadi semakin terbatas. Organisasi-organisasi perempuan di Aceh terpaksa mencari solusi sendiri untuk mengatasi

permasalahan kekurangan dana, salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan penggalangan dana melalui sistem (*fundraising*). Meskipun inisiatif-inisiatif *fundraising* yang selama ini dilakukan cenderung tidak cukup untuk menutupi semua biaya operasional bagi implementasi program, upaya-upaya tersebut menunjukkan pentingnya kesukarelawanan dan pendekatan non-profit. Beberapa kegiatan *fundraising* telah diterapkan oleh organisasi lokal dalam berbagai macam bentuk, diantaranya:

- **Subsidi bagi lembaga dari staf yang menjadi 'resource person.'** *Fundraising* seperti ini dilakukan jika salah seorang staf mendapat 'tugas' dari instansi lain, misalnya, menjadi fasilitator, trainer atau pemateri. Subsidi yang diberikan untuk lembaga biasanya 40% dari honor yang didapat si staf. 'Tradisi' ini dilakukan oleh beberapa lembaga seperti SP, RPuK, Balai Syura, KPI dan Flower Aceh;
- **Pemotongan perdiem dan uang transport.** Untuk menghemat biaya operasional program, lembaga melakukan re-*budgeting* untuk perdiem dan *transport*. Sebagai contoh, beberapa lembaga menyiasatinya dengan mengadakan kegiatan tidak terlalu jauh dari tempat komunitas untuk menghemat uang transport. Hal ini juga berlaku untuk staf yang melakukan kunjungan lapangan; beberapa lembaga melakukan pemotongan uang saku, dan sisanya bisa disimpan dan dimanfaatkan untuk kas lembaga. 'Kebiasaan' seperti ini dilakukan oleh SP dan KPI dan beberapa lembaga lain;
- **Pemotongan honor.** *Fundrasing* seperti ini dilakukan jika dalam kondisi sangat mendesak dan kondisi lembaga tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup. Beberapa staf setuju dan bersedia digaji tidak penuh jika program yang direncanakan mengalami keterbatasan dana. Staf diberi keleluasaan untuk menggunakan sisa waktu untuk berkerja di tempat lain sehingga kebutuhan sehari-harinya diharapkan bisa tetap terpenuhi. Hal seperti ini dilakukan oleh SP, RPuK, Balai Syura, dan KPI;
- **Iuran bulanan.** Lembaga yang berbentuk perkumpulan atau komunitas atau majelis memiliki aturan tentang 'kewajiban' iuran bulanan bagi para anggotanya sebagai kas lembaga (sesuai dengan kemampuan finansial tiap anggota) ada juga sebagian yang menentukan jumlah berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil dari iuran yang terkumpul dapat dijadikan sebagai tambahan dana dalam menjalankan program. Sebagian hasil iuran juga digunakan untuk dana simpan pinjam melalui koperasi yang dikelola secara bersama;
- **Hibah pribadi.** Bentuk *fundraising* ini adalah saat lembaga mendapat hibah berupa dana atau barang dari dermawan atau donatur perorangan. Walaupun masih tergolong sangat jarang, hibah pribadi masih dapat ditemui di beberapa lembaga seperti pernah dialami Flower Aceh.
- **Sistem tenaga kerja sukarela.** Kadang kala, para staf NGO perempuan menerapkan sistem bekerja secara sukarela saat dana menjadi sangat terbatas, sementara program akan segera berakhir. Sistem ini diberlakukan dengan dua pilihan, staf hanya berkerja 3 hari pada lembaga tersebut dan sisa hari bisa digunakan untuk kerja alternatif atau staf dapat bekerja seperti biasanya, akan tetapi tidak digaji penuh. Selain itu, ada beberapa aktivis perempuan bergabung secara sukarela tanpa gaji sama sekali, ada juga yang ikut membantu melakukan riset dan pengembangan lembaga. Pengalaman seperti ini pernah terjadi di KPI dan SP.[29]

[29] Hasil dokumentasi wawancara dengan beberapa LSM yang bergerak untuk isu penghapusan kekerasan berbasis gender terdiri dari, RPuK, SP Wilayah Aceh, KPI Aceh, Balai Syura, Flower dan Balai Inoeng Gampong Deah Teungoh.

3.2.2. Sumber Daya

Lahirnya berbagai organisasi kemanusiaan di Aceh telah menyediakan berbagai kesempatan bagi pembangunan sumber daya manusia dan keterampilan di daerah tersebut. NGO perempuan memiliki peran penting dalam proses transfer ilmu kepada masayarakat, khususnya kepada perempuan demi mencapai keadilan gender antara laki-laki dan perempuan melalui beberapa pelatihan antara lain:

- Pelatihan kepemimpinan
- Pelatihan tentang hukum dan hak-hak korban kekerasan
- Pelatihan tentang kesehatan dan hak reproduksi
- Pelatihan menjahit dan peningkatan kapasitas wirausaha
- Penyuluhan penyadaran hukum yang sensitif gender bagi aparat gampong[30].

3.3. Kendala yang Dihadapi dalam Bekerja pada Isu-Isu GBV

Bekerja demi perubahan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta keadilan gender membutuhkan pengabdian, usaha dan kerja keras. Pada tingkat yang mendasar, upaya ini merupakan usaha perubahan perspektif, pandangan dan ideologi masyarakat. Jadi, dari segi isu, upaya keadilan gender dan hak-hak perempuan dihadapakan pada berbagai tantangan terkait cara pandang sosial-budaya, bahkan dalam konteks tertentu juga agama. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, program-program keadilan gender membutuhkan dana yang mencukupi demi pelaksanaan program yang efektif. Hingga saat ini, organisasi-organisasi perempuan di Aceh masih bergantung secara finansial kepada lembaga-lembaga donor. Sejumlah upaya telah dilaksanakan untuk mengurangi dependensi ini, dan untuk menggunakan sumber daya setempat (termasuk kontribusi dari anggota masyarakat). Namun melihat tingkatan tantangan yang dihadapi, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa aktivis perempuan, dapat diidentifikasi beberapa tantangan umum yang dihadapi organisasi yang bekerja di bidang keadilan gender.

- Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi lembaga perempuan dalam membangun kesukarelawanan dalam berkerja untuk keadilan gender dan hak-hak perempuan.**Dominasi paham partriarkhi.** Meskipun paska Konflik dan tsunami telah membuat Aceh menjadi 'lebih maju' dalam berbagai aspek, khususnya sarana publik dan kesempatan pendidikan. Cara pandang budaya patriarkhi masih mendominasi keseharian masyarakat Aceh. Keterlibatan perempuan dalam politik dan berbagai lembaga publik masih sangat rendah. Berbagai hukum, peraturan dan kebijakan yang diskriminatif atau netral-gender juga masih sering ditemukan. Semua faktor tersebut membuatnya tidak mudah untuk memperoleh dukungan sukarela masyarakat dan pemerintah terhadap pergerakan menghapus GBV dan pemberdayaan perempuan;[31]
- **Penafsiran agama yang bias gender.** Agama Islam bagi masyarakat Aceh yang dianut oleh hampir 98 % penduduk provinsi Aceh adalah aspek yang sangat penting sehingga membentuk dasar pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh. Penafsiran agama yang tidak sensitif gender juga memunculkan berbagai kendala bagi perjuangan para aktivis perempuan. Penafsiran

[30] Ibid.

[31] Wawancara dengan Azriana, Sekjen RPuk, 18 Juli 2011.

agama yang berkembang saat ini membuat masyarakat melihat upaya pemberdayaan gender secara negatif, sehingga tidak mudah untuk memperoleh dukungan masyarakat atau mendorong mereka agar terlibat lebih efektif sebagai sukarelawan dalam gerakan ini;[32]

- **Kurangnya kesadaran masyarakat dalam isu GBV.** Kurangnya kesadaran dalam masyarakat Aceh menyebabkan dukungan dan partisipasi dalam upaya-upaya penghapusan GBV menjadi terhambat. Nilai-nilai patriarki dan penafsiran agama yang bias gender merupakan akar dari permasalahan ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, para aktivis perempuan telah menyarankan pentingnya melakukan berbagai pendekatan berdasarkan kearifan lokal, perspektif budaya dan agama – termasuk memanfaatkan tradisi gotong royong dan *wirid yasinan*[33] – dalam upaya mempromosikan keadilan gender; selain itu perlu juga menitikberatkan kerjasama dengan para tokoh agama dan tokoh adat;[34]
- **Kurangnya keterlibatan pemerintah.** Pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan atau *qanun* tentang pemberdayaan perempuan, tetapi kenyataannya pada tahap implementasi di lapangan terlihat masih sangat lemah. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap semangat untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya penguatan keadilan gender dan pemenuhan hak –hak perempuan untuk mengatasi GBV.[35]
- **Efek jangka panjang konflik dan tsunami.** Pengalaman hidup di bawah situasi konflik, kemudian bencana dahsyat tsunami, ikut menyumbang terhadap lemahnya solidaritas masyarakat. Konflik bersenjata telah membuat masyarakat 'lebih senang mencari aman sendiri' agar mampu bertahan hidup untuk bisa *survive*. Akibatnya, nilai-nilai kerjasama dan solidaritas mulai terkikis. Dalam situasi seperti ini, tentu tidak mudah membangkitkan lagi semangat kesukarelawanan dalam masyarakat – terutama terkait dengan isu-isu perempuan dan gender. Sekali lagi, pendekatan budaya dengan pendekatan yang sensitif gender yang menggunakan sumber daya dan kearifan lokal akan sangat membantu untuk menguatkan dan membangun kembali budaya kerjasama dalam masyarakat.[36]

3.4. Periode Pascadonor: Mencari Solusi

Setelah masa rekonstruksi berakhir yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir pada tahun 2009, banyak lembaga donor yang selama ini terlibat aktif dalam proses rekonstruksi juga ikut memutuskan meninggalkan Aceh sumber terhadap organisasi perempuan, beberapa diantaranya terpaksa menghentikan operasi karena kekurangan dan keterbatasan dana. Beberapa organisasi lain mampu bertahan, *survive*, dengan melakukan berbagai kegiatan *fundraising* sebagaimana telah digambarkan di bagian 3.2.1. Organisasi-organisasi perempuan kini mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan terjadinya 'krisis', yang dapat mengancam keberlangsungan kegiatan mereka.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis finansial termasuk:

- **Penguatan kerjasama dengan pemerintah**. Meski kenyataannya kepedulian pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang bekerja dalam isu gender masih sangat minim, akan tetapi

[32] Wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, tokoh aktivis perempuan Aceh, 27 Juli 2011.

[33] Wirid Yasinan merupakan salah satu cara mempromosikan keadilan gender bagi perempuan; Wirid Yasinan adalah suatu acara agama, seperti perkumpulan sosial dan pembacaan Al-Quran bersama.

[34] Wawancara dengan Desy Setiawaty, Direktur pelaksana Flower Aceh, 14 Juli 2011.

[35] Wawancara dengan Evany Clara Yanti, Sekretaris KPI Wilayah Aceh, 25 Juli 2011.

[36] Wawancara dengan Ruiada, Koordinator program SP Wilayah Aceh, 21 Juli 2011.

penting untuk melakukan advokasi agar pemerintah menjadi lebih terlibat dalam isu-isu keadilan gender dan hak-hak perempuan, serta untuk menuntut kewajiban negara terhadap pemunuhan hak-hak perempuan. Tentu saja, upaya ini perlu kerja keras karena tidak mudah dilakukan;[37]

- **Berkerja secara berjejaring (*networking*).** Dengan berkurangnya sumber daya finansial, sangatlah penting bagi organisasi untuk membangun jejaring dan bekerjasama. Di daerah Aceh, berbagai organisasi yang bekerja untuk keadilan gender sudah saling memiliki hubungan yang telah terbentuk dengan baik, hanya perlu mengoptimalkan jaringan-jaringan tersebut, hingga mencapai visi keadilan gender secara lebih luas;[38]
- **Penggalangan dana.** Pendekatan terhadap kalangan bisnis dan swasta juga sangat penting dilakukan di tengah berkurangnya bantuan dari lembaga donor. Upaya ini juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan bantuan secara sukarela dalam isu-isu keadilan gender. Tentu saja. sebelum melakukan langkah ini, lembaga-lembaga perempuan perlu memikirkan strategi mengenai siapa yang menjadi target dan bagaimana melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok yang berbeda.[39]

3.5. Kesukarelawanan dan Keterlibatan Laki-Laki: Studi Kasus pada Pulih Foundation

Yayasan Pulih didirikan di Jakarta pada bulan Juli 2002. Di Aceh, Yayasan Pulih, disebut juga dengan Puleh Aceh, berdiri pada tahun 2005, Yayasan Pulih mulai beroperasi di Aceh untuk menyediakan jasa konseling dalam rangka merespon pemulihan pascatsunami, bagi masyarakat yang membutuhkan layanan psikologis akibat tsunami, kekerasan domestik, seksual, kekerasan yang terjadi dalam komunitas atau akibat konflik politik. *Pulih* juga menyediakan dampingan konseling bagi para pekerja kemanusiaan, yang sering mengalami kelelahan atau trauma sekunder. Visi utama Puleh Aceh adalah terwujudnya pemulihan dan penguatan masyarakat korban kekerasan dan bencana menuju masyarakat yang sejahtera dan sehat secara psikososial, damai, bebas dari ketakutan dan kekerasan, demokratis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, HAM, keadilan sosial dan gender.[40]

Sejak 2011, Pulih Aceh telah bekerjasama dengan Aliansi Laki-Laki Baru, Rifka Annisa, dan UN Women untuk membangun program peningkatan keterlibatan laki-laki dalam proses penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan keadilan gender. Upaya melibatkan laki-laki berawal dari sebuah keinginan untuk melakukan pendekatan yang bersifat preventif dalam penghapusan GBV – untuk menghentikan kekerasan sebelum tindakan tersebut terjadi. Pada akhirnya, upaya-upaya ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, akan tetapi siapapun yang memiliki misi mencegah dan menghapus GBV, khususnya pada level pencegahan.

Keterlibatan kaum laki-laki dalam agenda VAW dan GBV masih kontroversial antara para aktivis perempuan. Terdapat kekhawatiran bahwa melibatkan laki-laki akan memberi ruang dominasi bagi laki-laki dalam menentukan agenda, yang kemudian bukannya mengikis tetapi justru mempertegas nilai-nilai patriarkhi yang menjadi akar ketidakadilan gender. Dalam konteks perdebatan ini, sangat penting bahwa organisasi-organisasi mendorong dialog terbuka seputar wacana pelibatan laki-laki.

[37] Wawancara dengan Nursiti, Ketua Presidium Balai Syura, 14 Juli 2011.
[38] Wawancara dengan Evany Clara Yanti, Sekretaris KPI Wilayah Aceh, 25 Juli 2011.
[39] Wawancara dengan Ruiada, Koordinator program SP Wilayah Aceh, 21 Juli 2011.
[40] www.pulih.or.id

Berikut adalah gambaran beberapa aktivitas program yang telah diimplementasikan oleh Pulih untuk memfasilitasi keterlibatan laki-laki dan untuk mendukung budaya kesukarelawanan yang lebih luas di daerah Aceh.

3.5.1. Seminar mengenai "Pelibatan Laki-Laki dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh"

Seminar ini merupakan kegiatan awal dari beberapa upaya memperkuat keterlibatan dan kontribusi laki-laki dalam isu keadilan gender. Selain untuk sosialisasi, kegiatan ini penting untuk ditujukan pada media, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan membangun wacana publik seputar keterlibatan laki-laki dalam isu-isu gender. Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 50 aktivis perempuan dari berbagai lembaga, media cetak dan beberapa organisasi dan lembaga – pemerintah dan NGO – yang berada di Banda Aceh.

Isu-isu yang dibahas meliputi:

- Mengapa perlu keterlibatan laki-laki dalam agenda penghapusan kekerasan berbasis gender di Aceh;
- Latar belakang berkembangnya gagasan pelibatan laki-laki dalam agenda keadilan gender, khususnya dalam konteks nasional;
- Transformasi maskulinitas sebagai agenda penting dalam upaya pelibatan laki-laki dalam agenda keadilan gender.

Dari hasil seminar, agenda keadilan gender perlu menjadi ruang terbuka bagi terbangunnya semangat keterlibatan masyarakat dalam agenda keadilan gender dan hak-hak perempuan, khususnya di Aceh. Selama ini, sangat mungkin, khususnya kelompok laki-laki, masyarakat menghadapi kesulitan ketika berkeinginan untuk terlibat lebih aktif dalam berbagai upaya penguatan keadilan gender dan hak-hak perempuan. Selain itu, semakin jelas bahwa masih dibutuhkan lebih banyak perjuangan lagi agar para laki-laki di daerah Aceh mulai terlibat dalam agenda keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Memang sejak dulu laki-laki telah menghadapi berbagai tantangan saat ingin terlibat dalam pergerakan hak-hak perempuan, atau ketika mereka ingin terlibat dalam perjuangan demi keadilan gender. Hal ini bisa saja teratasi bila keterlibatan para laki-laki ditaruh dalam konteks konsep perubahan sosial yang lebih luas, dan dilihat sebagai suatu bagian dari upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

Foto: Seminar sehari tantang pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Aceh

3.5.2. Lomba Pidato bagi Pelajar SLTA

Sebagai salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang paling penting dalam menciptakan perubahan, kaum pelajar harus dilibatkan sebagai *partner* kunci dalam upaya penguatan keadilan gender dan menghapus VAW. Sebagai agenda melibatkan pelajar dan lembaga pendidikan, Pulih telah mengadakan lomba pidato yang melibatkan para peserta untuk menyampaikan pendapat melalui lomba pidato dengan dengan topik "Ayo Bicara Soal Laki-Laki di Aceh: Peran Pelajar dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan".

Lomba ini menjadi suatu pintu masuk bagi peningkatan kesadaran kaum pelajar mengenai isu-isu gender, serta untuk mendorong keterlibatan mereka dalam agenda keadilan gender. Lomba pidato tersebut juga berfungsi untuk mempromosikan tindakan sukarela antara pelajar. Selain itu, melibatkan kaum pelajar juga sekaligus membuka kesempatan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Melibatkan lembaga pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting, sebab lembaga-lembaga tersebut juga berkewajiban menanggapi kasus kekerasan dalam lingkungan mereka. Nyatanya akhir-akhir ini, kasus-kasus seperti *bullying*, tawuran, 'genk motor' dan kekerasan oleh guru, sudah banyak dilaporkan terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Berdasarkan observasi lapangan, lomba pidato tersebut telah membangun semangat partisipasi, dengan secara langsung melibatkan kaum pelajar dalam agenda mewujudkan keadilan gender. Lomba tersebut tidak menyediakan uang transportasi atau per diem, maupun hadiah materi yang besar bagi para pemenang – untuk menghilangkan resiko para peserta termotivasi mengikuti lomba demi imbalan, dan agar memancing partisipasi yang bersifat sukarela.

Foto: Peserta lomba pidato "Ayo bicara soal laki-laki "berpose bersama dewan juri dan tim PULIH Aceh pada penentuan pemenang di Politehnik Aceh

Lomba pidato tersebut mengkritisi hubungan antara keadilan gender dan tujuan-tujuan pekerjaan sosial-kemanusiaan yang lebih luas. Bermula dari kegiatan ini menginspirasi proses selanjutnya yaitu untuk mengadakan diskusi informal seputar isu gender, seksualitas dan perempuan.

3.5.3. Forum Belajar Bersama dan Aksi Damai

Forum belajar bersama dan aksi damai di pusat kota di Banda Aceh juga memainkan peran yang penting dalam agenda melibatkan laki-laki, khususnya dengan mendorong pandangan dan pemikiran

kritis terhadap isu-isu gender, seksualitas, dan perempuan. Forum-forum ini diselenggarakan dengan dasar prinsip kebebasan berbicara, pemikiran terbuka, dan zero-toleransi terhadap diskriminasi atau kekerasan. Di samping para aktivis yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini, sejumlah mahasiswa mewakili dari beberapa Universitas di Banda Aceh juga ikut hadir. Terlibatnya peserta-peserta 'baru' ini telah memperluas jaringan dalam mempromosikan agenda keterlibatan laki-laki dan keadilan gender. Ruang partisipasi dalam isu-isu GBV menjadi lebih terbuka dan tersedia bagi generasi muda di tingkat Universitas.

Pada akhir kegiatan forum belajar bersama, para peserta menunjukkan semangat mereka dengan mengadakan aksi damai untuk menolak Segala Bentuk Kekerasan di pusat kota Banda Aceh, melalui aksi damai yang dinamakan dengan Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan – AMAN. Aksi damai ini juga menjadi suatu ajakan publik agar menjadi lebih sadar atas isu-isu kekerasan, dan menjadi bagian dari upaya penghapusannya.

Foto: Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan (AMAN) melakukan aksi damai di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh.

3.5.4. Melibatkan Laki-Laki demi Perubahan yang Berkelanjutan

Keberlanjutan merupakan suatu isu yang penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan program-program peningkatan partisipasi dan kontribusi laki-laki dalam pencegahan dan penghapusan GBV. Sangatlah penting untuk memikirkan bagaimana menghindari pemikiran keterlibatan laki-laki menjadi suatu 'proyek sesaat', dengan memastikan bahwa konsep-konsep tersebut secara konsisten disertakan dalam perancangan semua kegiatan yang fokus pada isu GBV. Dengan demikian, mungkin saja dalam suatu proyek dapat ditemukan cara-cara baru untuk mendorong parsitipasi yang sukarela. Pulih serta organisasi dan aktivis lainnya berencana melanjutkan upaya mereka bekerja bersama laki-laki, sebagai bagian dari agenda menciptakan kesetaraan gender di wilayah Aceh. Berbagai forum refleksi dan diskusi juga tetap diselenggarakan oleh para sukarelawan yang bekerja dengan prinsip gotong royong. Beberapa aktivis juga bersedia menjadi tuan rumah dalam menfasilitasi dan menyediakan tempat pertemuan. Bila tindakan-tindakan seperti ini bisa terus dilakukan dan dipertahankan, maka pada akhirnya hal tersebut dapat membentuk suatu tradisi penting bagi perjuangan keadilan gender dan hak-hak perempuan di Aceh yang menganut salah satu prinsip sukarela.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara para narasumber, berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai kesukarelawanan dan partisipasi dalam memperjuangkan keadilan gender dan hak-hak perempuan di Aceh:

- Praktek-praktek sosial-budaya yang menunjukkan semangat kesukarelawanan sudah lama hidup di Aceh, dan dapat dilihat dalam bentuk tradisi *meuseuraya* atau gotong royong;
- Di kalangan para aktivis perempuan, telah terbangun pemahaman yang kuat bahwa program-program gender tidak hanya dikerjakan atas menjalankan kebutuhan sebuah proyek akan tetapi harus dikerjakan atas komitmen-komitmen kemanusiaan dalam hal penegakan keadilan gender, menghapus kekerasan berbasis gender, menegakkan hak-hak perempuan, dan mempromosikan keadilan sosial;
- Para aktivis yang bekerja pada isu keadilan gender telah menunjukkan semangat kesukarelawanan dengan: menerima pemotongan gaji; meminimalkan keuntungan yang diperoleh dari uang per diem atau transportasi; dan subsidi lembaga dari staf yang menjadi *resource person*, dan lain-lain.
- Berakhirnya operasi para lembaga donor setelah masa rehabilitasi pasca-tsunami yang dinyatakan berakhir pada tahun 2009 telah memberi tantangan-tantangan finansial kepada organisasi perempuan. Namun organisasi-organisasi tersebut telah menanggapi masalah tersebut secara strategis, dengan: melakukan berbagai kegiatan *fundraising*; memperkuat jaringan kerja mereka; meningkatkan efisiensi program; melakukan advokasi untuk (lebih banyak lagi) mencari dukungan dari pemerintah; dan mendorong semangat kesukarelawanan demi keberlangsungan organisasi;
- Teridentifikasi beberapa kendala dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu GBV, yang juga membatasi kesukarelawanan dalam agenda-agenda keadilan-gender. Kurangnya keterlibatan pemerintah dalam isu-isu gender membatasi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran, ataupun untuk mendorong anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya-upaya keadilan gender. Kurangnya komitmen dari pemerintah juga membuat masyarakat melihat isu-isu ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu hal yang sepele dan tidak membutuhkan partisipasi publik.
- Nilai-nilai patriarkhi yang sudah tertanam dalam masyarakat merupakan akar permasalahan ketidakadilan gender dan VAW. Bias patriarkhi ini selanjutnya membuat masyarakat enggan terlibat secara sukarela dalam agenda penegakan keadilan gender dan penghapusan GBV di Aceh.
- Bekerja sebagai seorang profesional bukan berarti tidak boleh untuk tetap menegakkan prinsip-prinsip kesukarelawanan. Di sisi yang lain, para sukarelawan juga harus mampu menunjukan bekerja dengan sikap yang profesional, meskipun tidak menerima imbalan atau bayaran yang maksimal.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi-rekomendasi di bawah ini dirangkum berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, serta dari hasil observasi langsung dengan beberapa organisasi perempuan. Rekomendasi-rekomendasi ini khususnya berhubungan dengan memperkuat tradisi

kesukarelawanan di Aceh khususnya, tujuannya adalah sebagai bagian dalam perjuangan membangun keadilan gender dan mengakhiri kekerasan berbasis gender:

1) Penguatan koordinasi dan jejaring antarlembaga

Di Aceh, banyak sekali organisasi yang bekerja pada isu penguatan keadilan gender, dan fakta ini harus diakui sebagai suatu aset dalam upaya melestarikan 'budaya' kesukarelawanan dan berkerja pada isu GBV di wilayah Aceh. Beberapa jaringan kerja telah dibentuk untuk saling menghubungkan dan mendorong kerjasama antara organisasi-organisasi tersebut, seperti seperti Gender Working Group (GWG) dan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS). Selain lembaga yang disebut di atas, masih banyak lembaga lain, seperti KKTGA, LBH Apik, CCDE, Violet Grey, PKPA, dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut merupakan sebuah kekuatan untuk pengembangan 'budaya' kesukarelawanan dalam kerja penguatan keadilan gender dan hak-hak perempuan di Aceh. Namun, masih diperlukan berbagai upaya untuk mempererat hubungan organisasi-organisasi yang telah bekerja dalam program-program yang serupa – untuk mendorong kerjasama untuk berbagi hasil (*result*) yang bermanfaat dan telah dicapai. Selain itu, tentu saja, dengan kerjasama, implementasi program juga bisa dilakukan lebih efisien, terutama karena saat ini sumberdaya finansial untuk kerja sosial-kemanusiaan, termasuk penguatan keadilan gender mulai berkurang seiring 'kepergian' lembaga-lembaga donor dari Aceh. Dalam konteks ini, berkurangnya lembaga donor seharusnya mendorong organisasi-organisasi perempuan untuk memperkuat kerjasama mereka dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki visi yang sama.

2) Penguatan kerja sama dengan pemerintah

Meningkatkan dan membangun kesempatan-kesempatan baru untuk bekerjasama dengan pemerintah tidak hanya penting dalam hal *budgetting*, dan juga memiliki potensi meningkatkan kesadaran serta keinginan pemerintah untuk menanggapi isu-isu ketidakadilan gender. Memperkuat kerjasama dengan pemerintah juga penting dilaksanakan demi keperluan mekanisme monitoring – khususnya dalam kaitannya dengan mengukur efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan gender dan hak perempuan. Organisasi-organisasi perempuan perlu memikirkan berbagai upaya untuk melakukan pendekatan dan membangun hubungan kerjasama dengan pemerintah sebagai suatu bagian utama dalam agenda menciptakan keadilan gender dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan.

3) Reoptimalisasi Budaya Kesukarelawanan dan Gotong Royong

Konflik berkepanjangan selama tiga puluh tahun, dampak tsunami, serta budaya ketergantungan-pada-bantuan yang kemudian berkembang di Aceh, telah ikut mengikis pandangan tradisional mengenai kesukarelawanan dan gotong royong. Mengingat bahwa tradisi-tradisi tersebut telah menjadi bagian masyarakat selama bergenerasi lamanya, maka sangatlah penting untuk melestarikan kembali budaya kesukarelawanan dan gotong royong ini. Upaya mendorong partisipasi laki-laki dalam agenda keadilan gender bisa dijadikan suatu pintu masuk menuju penguatan tradisi gotong royong. Selain itu, juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana kearifan dan budaya lokal dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang kooperatif dengan berbagai lembaga dan tingkatan masyarakat yang berbeda.

4) Meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam pencegahan GBV

Meskipun pelibatan laki-laki agar terlibat dalam agenda hak-hak perempuan masih merupakan suatu isu yang diperdebatkan dan tidak selalu ditanggapi positif. Muncul pandangan umum bahwa keterlibatan laki-laki justru akan memunculkan masalah-masalah baru. Akan tetapi, inisiatif ini dipandang perlu dilakukan untuk mempertimbangkan bagaimana cara mengembangkan agenda-agenda pelibatan laki-laki dalam upaya menghapus GBV, sebagai suatu bagian dalam proses mewujudkan keadilan gender, dan sebagai suatu metode mempromosikan ide mencegah kekerasan sebelum terjadi sama sekali. Selain itu, keterlibatan laki-laki juga akan mengurangi persepsi bahwa hanya perempuan yang bertanggung jawab atas isu-isu keadilan gender.Sampai saat ini hasil penelusuran dan wawancara, telah terbentuk suatu Komunitas, Komunitas Laki-Laki untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender (KLLuKKG) telah didirikan di Aceh. Di bawah jaringan kerja berbagai organisasi perempuan yang bekerja pada issue pencegahan dan penghentian GBV, ini membuktikan suatu ruang baru telah diciptakan untuk laki-laki yang melawan kekerasan terhadap perempuan dan untuk mempromosikan keadilan gender.

BIBLIOGRAFI

Studi Literatur:

Ramli Harun, Tjut Rahma, MA. Gani, Drs, 1985, ***Adat Aceh***, Proyek penerbitan buku dan sastra Indonesia dan daerah. Balai Pustaka Jakarta

Emi Suhaimi, Hj. Dra, 1993, ***Wanita Aceh dalam pemerintahan dan peperangan***, Yayasan pendidikan, A.Hasyimi, Banda Aceh

Dokumen Wawancara:

Wawancara dengan Linda Chistanty, pengamat sosial, menetap di Banda Aceh untuk kantor berita Aceh feature dan aktif menulis buku, 22 Juni 2011.

Wawancara dengan Badruzzaman, Ketua MAA, 5 Juli 2011.

Wawancara dengan Hasan Basri M. Nur, pengamat sosial menetap di Banda Aceh dan aktif sebagai penulis di media cetak, 19 Juli 2011.

Wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, tokoh aktivis perempuan Aceh, 27 Juli 2011.

Wawancara dengan sejumlah lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang mewakili lembaga yang bergerak untuk issue gender dan perempuan di Provinsi Aceh.

Website:

http://www.partners4prevention.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.unv.org/
http://www.acehbooks.org/
http://www.jurnalperempuan.com/
http://floweraceh.or.id/
http://jurnalperempuan.com/2011/05/bisakah-laki-laki-menjadi-feminis/
http://www.acehbooks.org/overview?language=ind&order=title&page=2
http://komunitaslaki-lakibaruaceh.blogspot.com
http://komunitaslaki-lakibaruaceh.blogspot.com/2011/09/renstra-1-tahun-laki-laki-baru-di-aceh.html
http://yayasanpulehaceh.blogspot.com
http://yayasanpulehaceh.blogspot.com/2011/07/renstra-1-tahun-laki-laki-baru-di-aceh.html
http://www.pulih.or.id
http://www.pulih.or.id/berita.html?x=ZlI9H3FTkSYHjumpXBBg9T9mMXLu%2FQ%3D%3D
http://www.pulih.or.id/berita.html?x=lk8h%2B1IexG%2BK4TGQfCmHTM9t%2FnkZ4g%3D%3D
http://www.acehkita.com/berita/hukum-pelaku-kekerasan-lindungi-korban-aman/